



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang
- a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor 437).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.

7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
9. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
10. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
18. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.

19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
25. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
29. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
31. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.
32. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Kabupaten Kaimana tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kabupaten Kaimana.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Kabupaten Kaimana sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
35. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BHPRD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BHPRD dalam:
 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat kampung serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kampung;
 4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 8. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
 9. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan BHPRD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang:

- a. Pengalokasian BHPRD;
- b. Pengelolaan BHPRD;
- c. Penggunaan BHPRD;
- d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi BHPRD;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Ketentuan Sanksi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENGALOKASIAN BHPRD

Bagian Kesatu Penganggaran BHPRD

Pasal 5

- (1) BHPRD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Daerah dalam APBD yang diperuntukkan bagi kampung.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Rincian BHPRD Setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran BHPRD, yaitu:
 - a. BHPD sebesar Rp. 653.680.164,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. BHRD sebesar Rp. 651.108.578,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap kampung yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
 - a. Asas merata adalah pembagian BHPRD sebesar 60% (enam puluh per seratus) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar; dan

- b. Asas adil adalah pembagian BHPRD sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Formula, yang dtentutkan berdasarkan indikator :
1. Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 2. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 3. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
- a. Alokasi Dasar dari BHPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp. 392.280.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Alokasi Dasar dari BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 390.684.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
- a. Alokasi Formula dari BHPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 261.400.164,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu seratus enam puluh empat rupiah); dan
 - b. Alokasi Formula dari BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp. 260.424.578,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 7

- (1) Pengalokasian BHPD bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\boxed{\text{BHPD-k} = (\text{AD-k} + \text{AF-k})}$$

Keterangan :

- BHPD-k = Bagian Hasil Pajak Daerah setiap kampung
 AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung
 AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

- (2) Besaran Alokasi Dasar BHPD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibagi jumlah kampung di Kabupaten Kaimana sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu masing-masing sebesar Rp. 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran Alokasi Formula BHPD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,10 \times RL) + (0,40 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

- AF-k = Alokasi Formula setiap kampung
- RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana
- RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana
- RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana
- RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana
- AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

Pasal 8

- (1) Pengalokasian BHRD bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BHRD-k = (AD-k + AF-k)$$

Keterangan :

- BHRD-k = Bagian Hasil Retribusi Daerah setiap kampung
- AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung
- AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

- (2) Besaran Alokasi Dasar BHRD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dibagi 84 (delapan puluh empat) Kampung, yaitu masing-masing sebesar Rp. 4.651.000,- (empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Besaran Alokasi Formula BHRD setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,10 \times RL) + (0,40 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

- (4) Rincian Alokasi Dasar BHRD dan Alokasi Formula BHRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

Pasal 10

Prinsip pengelolaan BHPRD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan BHPRD;

- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. BHPRD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan
- e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana

Pasal 11

- (1) BHPRD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Dinas PMK.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme penyaluran dana sebagaimana pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, yaitu secara keseluruhan sebesar 100% (*seratus persen*).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan kampung mengenai APBK Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Kampung; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Kampung.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (10) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, BHPRD pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan BHPRD kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKK pada Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Penggunaan BHPRD mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (2) BHPRD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan BHPRD tertuang dalam prioritas belanja Kampung pada APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung;
 - c. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
 - d. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

- (4) BHPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan belanja kegiatan pada:
 - a. Belanja kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - b. Belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung, yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.
- (5) BHPRD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan BHPRD.
- (3) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBK yang dilaksanakan oleh Dinas PMK.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBK.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan BHPRD.

- (5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan BHPRD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan menjadi dokumen Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Semester I Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun 2024.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) BHPRD Semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun 2024.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi siskeudes.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Bupati melalui Kepala Dinas PMK dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 17

- (1) Publikasi penggunaan BHPRD terintegrasi dengan publikasi pengelolaan APBK.
- (2) Publikasi penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- (3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif Kampung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Sarana publikasi dilakukan melalui :
 - a. Baliho;
 - b. Papan informasi Kampung;
 - c. Media elektronik;
 - d. Media sosial;
 - e. *Website* Kampung;
 - f. *Leaflet*;
 - g. Pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2024, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Terdapat sisa BHPRD di RKK Tahun Anggaran 2024 lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2024 sebesar Sisa BHPRD di RKK Tahun Anggaran 2023.
- (3) Dalam hal sisa BHPRD di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2023 lebih besar dari jumlah BHPRD yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2024, penyaluran

BHPRD Tahun Anggaran 2024 tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun 2024 sisa BHPRD di RKK Tahun Anggaran 2023 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
- (5) Dinas PMK melaporkan BHPRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.
- (6) BHPRD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan BHPRD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMK sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPRD Tahun Anggaran 2024 yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa BHPRD di RKK Tahun Anggaran 2023 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun 2023, BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
- (3) Dinas PMK melaporkan sisa BHPRD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 2024 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK TA. 2025.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa BHPRD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hasil sisa BHPRD Tahun Anggaran 2023 di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2024, sisa BHPRD tersebut

diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKK Tahun Anggaran 2024.

- (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2024, Dinas PMK menyampaikan permintaan penyaluran sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Bupati Kaimana paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun 2024.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa BHPRD dari Dinas PMK, Bupati menyalurkan sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK paling lambat bulan Agustus tahun 2023.
- (9) Dalam hal Dinas PMK tidak menyampaikan permintaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa BHPRD yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUD.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran BHPRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa BHPRD di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPRD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan BHPRD oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Dinas PMK.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan BHPRD oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 14 Juni 2024

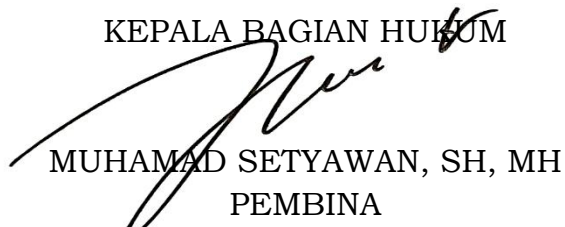
BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 447

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG			PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KAMPUNG
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	92.08.01 KAIMANA	79.390.000	59.768.656	139.158.656	79.067.000	65.009.000	144.076.000	283.234.656
1	92.08.01.2002 MARSIS	4.670.000	1.752.494	6.422.494	4.651.000	1.745.480	6.396.480	12.818.974
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	4.670.000	3.438.514	8.108.514	4.651.000	3.333.440	7.984.440	16.092.954
3	92.08.01.2004 LOBO	4.670.000	5.376.425	10.046.425	4.651.000	5.381.160	10.032.160	20.078.585
4	92.08.01.2005 TRIKORA	4.670.000	8.105.634	12.775.634	4.651.000	8.854.430	13.505.430	26.281.064
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	4.670.000	3.940.856	8.610.856	4.651.000	3.925.070	8.576.070	17.186.926
6	92.08.01.2007 SISIR	4.670.000	3.242.254	7.912.254	4.651.000	3.125.100	7.776.100	15.688.354
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	4.670.000	3.189.959	7.859.959	4.651.000	2.864.670	7.515.670	15.375.629
8	92.08.01.2009 MURANO	4.670.000	3.216.106	7.886.106	4.651.000	3.125.090	7.776.090	15.662.196
9	92.08.01.2010 MAIMAI	4.670.000	3.189.959	7.859.959	4.651.000	3.426.240	8.077.240	15.937.199
10	92.08.01.2011 LUMIRA	4.670.000	3.268.401	7.938.401	4.651.000	3.229.260	7.880.260	15.818.661
11	92.08.01.2012 KAMAKA	4.670.000	3.163.812	7.833.812	4.651.000	3.229.260	7.880.260	15.714.072
12	92.08.01.2013 COA	4.670.000	5.523.186	10.193.186	4.651.000	7.343.980	11.994.980	22.188.166

13	92.08.01.2015 SARIA	4.670.000	2.490.099	7.160.099	4.651.000	2.480.130	7.131.130	14.291.229
14	92.08.01.2016 JARATI	4.670.000	3.242.254	7.912.254	4.651.000	3.333.430	7.984.430	15.896.684
15	92.08.01.2017 SARA	4.670.000	1.726.102	6.396.102	4.651.000	3.362.080	8.013.080	14.409.182
16	92.08.01.2018 WERUA	4.670.000	1.730.945	6.400.945	4.651.000	3.125.090	7.776.090	14.177.035
17	92.08.01.2019 ORAI	4.670.000	3.171.656	7.841.656	4.651.000	3.125.090	7.776.090	15.617.746
B	92.08.02 BURUWAY	46.700.000	31.002.693	77.702.693	46.510.000	31.407.260	77.917.260	155.619.953
1	92.08.02.2001 KAMBALA	4.670.000	3.413.191	8.083.191	4.651.000	3.399.510	8.050.510	16.133.701
2	92.08.02.2002 YARONA	4.670.000	3.242.254	7.912.254	4.651.000	2.864.680	7.515.680	15.427.934
3	92.08.02.2003 EDOR	4.670.000	4.117.580	8.787.580	4.651.000	3.125.090	7.776.090	16.563.670
4	92.08.02.2004 TAIRI	4.670.000	2.191.629	6.861.629	4.651.000	2.182.850	6.833.850	13.695.479
5	92.08.02.2005 GAKA	4.670.000	3.169.041	7.839.041	4.651.000	3.333.440	7.984.440	15.823.481
6	92.08.02.2006 GURIASA	4.670.000	3.189.959	7.859.959	4.651.000	3.362.090	8.013.090	15.873.049
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	4.670.000	2.191.629	6.861.629	4.651.000	3.333.430	7.984.430	14.846.059
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	4.670.000	3.166.427	7.836.427	4.651.000	3.333.430	7.984.430	15.820.857
9	92.08.02.2009 ESANIA	4.670.000	3.197.803	7.867.803	4.651.000	3.362.080	8.013.080	15.880.883
10	92.08.02.2010 HIA	4.670.000	3.123.178	7.793.178	4.651.000	3.110.660	7.761.660	15.554.838
C	92.08.03 TELUK ARGUNI	112.080.000	66.327.236	178.407.236	111.624.000	64.855.010	176.479.010	354.886.246
1	92.08.03.2001 FURNUSU	4.670.000	1.989.966	6.659.966	4.651.000	1.981.990	6.632.990	13.292.956
2	92.08.03.2002 FETERNU	4.670.000	3.229.409	7.899.409	4.651.000	3.216.480	7.867.480	15.766.889

3	92.08.03.2003 SAWI	4.670.000	4.052.817	8.722.817	4.651.000	3.367.280	8.018.280	16.741.097
4	92.08.03.2004 TUGARNI	4.670.000	3.208.401	7.878.401	4.651.000	3.195.550	7.846.550	15.724.951
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	4.670.000	2.348.388	7.018.388	4.651.000	2.338.980	6.989.980	14.008.368
6	92.08.03.2012 BOFUWER	4.670.000	1.917.890	6.587.890	4.651.000	1.910.210	6.561.210	13.149.100
7	92.08.03.2013 WARWARSI	4.670.000	1.407.405	6.077.405	4.651.000	1.401.770	6.052.770	12.130.175
8	92.08.03.2014 WANGGITA	4.670.000	3.218.811	7.888.811	4.651.000	3.205.910	7.856.910	15.745.721
9	92.08.03.2016 FUDIMA	4.670.000	2.842.090	7.512.090	4.651.000	2.830.700	7.481.700	14.993.790
10	92.08.03.2017 WESWASA	4.670.000	2.261.362	6.931.362	4.651.000	2.252.300	6.903.300	13.834.662
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	4.670.000	2.754.499	7.424.499	4.651.000	2.743.460	7.394.460	14.818.959
12	92.08.03.2019 AFUAFU	4.670.000	2.578.024	7.248.024	4.651.000	2.567.690	7.218.690	14.466.714
13	92.08.03.2020 BAYEDA	4.670.000	2.568.633	7.238.633	4.651.000	2.558.350	7.209.350	14.447.983
14	92.08.03.2021 MOYANA	4.670.000	3.823.340	8.493.340	4.651.000	3.808.020	8.459.020	16.952.360
15	92.08.03.2022 KOKORоба	4.670.000	3.252.712	7.922.712	4.651.000	3.362.090	8.013.090	15.935.802
16	92.08.03.2023 WAINAGA	4.670.000	3.247.483	7.917.483	4.651.000	3.338.640	7.989.640	15.907.123
17	92.08.03.2024 MASKUR	4.670.000	3.252.712	7.922.712	4.651.000	3.482.440	8.133.440	16.056.152
18	92.08.03.2025 KENSI	4.670.000	4.252.812	8.922.812	4.651.000	3.229.260	7.880.260	16.803.072
19	92.08.03.2027 ERIGARA	4.670.000	2.342.323	7.012.323	4.651.000	2.332.930	6.983.930	13.996.253
20	92.08.03.2028 PIGO	4.670.000	1.809.457	6.479.457	4.651.000	1.802.200	6.453.200	12.932.657
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	4.670.000	1.938.963	6.608.963	4.651.000	1.931.190	6.582.190	13.191.153
22	92.08.03.2030 TIWARA	4.670.000	1.998.201	6.668.201	4.651.000	1.990.190	6.641.190	13.309.391

23	92.08.03.2031	GUSI	4.670.000	2.985.240	7.655.240	4.651.000	2.973.290	7.624.290	15.279.530
24	92.08.03.2032	WARUA	4.670.000	3.046.298	7.716.298	4.651.000	3.034.090	7.685.090	15.401.388
D	92.08.04	TELUK ETNA	23.350.000	16.484.324	39.834.324	23.255.000	16.161.640	39.416.640	79.250.964
1	92.08.04.2001	RURUMO	4.670.000	3.295.150	7.965.150	4.651.000	2.890.420	7.541.420	15.506.570
2	92.08.04.2002	BOIYA	4.670.000	3.200.418	7.870.418	4.651.000	3.333.430	7.984.430	15.854.848
3	92.08.04.2003	NARIKI	4.670.000	3.250.621	7.920.621	4.651.000	3.354.260	8.005.260	15.925.881
4	92.08.04.2004	BAMANA	4.670.000	3.252.712	7.922.712	4.651.000	3.229.270	7.880.270	15.802.982
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	4.670.000	3.485.423	8.155.423	4.651.000	3.354.260	8.005.260	16.160.683
E	92.08.05	KAMBRAU	32.690.000	22.016.717	54.706.717	32.557.000	22.111.710	54.668.710	109.375.427
1	92.08.05.2001	RAUNA	4.670.000	3.487.079	8.157.079	4.651.000	3.473.110	8.124.110	16.281.189
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	4.670.000	1.986.300	6.656.300	4.651.000	3.229.260	7.880.260	14.536.560
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	4.670.000	3.242.254	7.912.254	4.651.000	3.229.270	7.880.270	15.792.524
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	4.670.000	2.980.782	7.650.782	4.651.000	3.354.270	8.005.270	15.656.052
5	92.08.05.2005	WAHO	4.670.000	2.991.240	7.661.240	4.651.000	3.343.860	7.994.860	15.656.100
6	92.08.05.2006	WAMESA	4.670.000	3.223.951	7.893.951	4.651.000	2.135.480	6.786.480	14.680.431
7	92.08.05.2007	KOOY	4.670.000	4.105.111	8.775.111	4.651.000	3.346.460	7.997.460	16.772.571
F	92.08.06	ARGUNI BAWAI	70.050.000	44.637.361	114.687.361	69.765.000	39.385.668	109.150.668	223.838.029
1	92.08.06.2001	JAWERA	4.670.000	3.245.391	7.915.391	4.651.000	3.860.020	8.511.020	16.426.411
2	92.08.06.2002	RUARA	4.670.000	2.325.490	6.995.490	4.651.000	2.316.170	6.967.170	13.962.660

3	92.08.06.2003	WERMENU	4.670.000	2.534.142	7.204.142	4.651.000	2.901.578	7.552.578	14.756.720
4	92.08.06.2004	EGERWARA	4.670.000	2.090.952	6.760.952	4.651.000	2.082.580	6.733.580	13.494.532
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	4.670.000	2.666.629	7.336.629	4.651.000	2.655.950	7.306.950	14.643.579
6	92.08.06.2006	MANGGERA	4.670.000	3.245.391	7.915.391	4.651.000	3.032.380	7.683.380	15.598.771
7	92.08.06.2007	TANUSAN	4.670.000	3.242.254	7.912.254	4.651.000	3.258.320	7.909.320	15.821.574
8	92.08.06.2008	URISA	4.670.000	4.304.033	8.974.033	4.651.000	1.635.530	6.286.530	15.260.563
9	92.08.06.2009	WAROMI	4.670.000	2.727.738	7.397.738	4.651.000	2.716.820	7.367.820	14.765.558
10	92.08.06.2010	UKIARA	4.670.000	3.248.006	7.918.006	4.651.000	2.082.350	6.733.350	14.651.356
11	92.08.06.2012	NAGURA	4.670.000	2.507.875	7.177.875	4.651.000	2.497.820	7.148.820	14.326.695
12	92.08.06.2013	INARI	4.670.000	2.981.458	7.651.458	4.651.000	2.082.360	6.733.360	14.384.818
13	92.08.06.2014	WANOMA	4.670.000	2.987.850	7.657.850	4.651.000	2.975.890	7.626.890	15.284.740
14	92.08.06.2015	SUMUN	4.670.000	3.218.427	7.888.427	4.651.000	3.205.540	7.856.540	15.744.967
15	92.08.06.2016	SERARAN	4.670.000	3.311.725	7.981.725	4.651.000	2.082.360	6.733.360	14.715.085
G	92.08.07	YAMOR	28.020.000	21.163.177	49.183.177	27.906.000	21.494.290	49.400.290	98.583.467
1	92.08.07.2001	URE	4.670.000	3.372.990	8.042.990	4.651.000	4.437.100	9.088.100	17.131.090
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	4.670.000	3.974.003	8.644.003	4.651.000	3.090.630	7.741.630	16.385.633
3	92.08.07.2003	URUBIKA	4.670.000	3.529.873	8.199.873	4.651.000	3.640.740	8.291.740	16.491.613
4	92.08.07.2004	WAGOHA	4.670.000	3.320.695	7.990.695	4.651.000	3.617.300	8.268.300	16.258.995

5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	4.670.000	3.582.167	8.252.167	4.651.000	3.354.260	8.005.260	16.257.427
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	4.670.000	3.383.449	8.053.449	4.651.000	3.354.260	8.005.260	16.058.709
TOTAL		392.280.000	261.400.164	653.680.164	390.684.000	260.424.578	651.108.578	1.304.788.742

KONTROL PENGHITUNGAN	BPHD	BHRD
PAGU KABUPATEN	Rp 653.680.164	Rp 651.108.578
1. Pagu Alokasi Dasar (60%)	Rp 392.280.000	Rp 390.684.000
2. Pagu Alokasi Formula (40%)	Rp 261.400.164	Rp 260.424.578
3. Pagu Alokasi Formula Per-Kampung	Rp 4.670.000	Rp 4.651.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA													JUMLAH ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		
			Jumlah Penduduk <i>(JP)</i>	Rasio Jumlah Penduduk <i>(RJP)</i>	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin <i>(JPM)</i>	Rasio Penduduk Miskin <i>(RPM)</i>	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah <i>(LW)</i>	Rasio Luas Wilayah <i>(RLW)</i>	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis <i>(IKG)</i>	Rasio Indeks Kesulitan Geografis <i>(RIKG)</i>	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
(1)	(2)	(3) = (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
A	92.08.01 KAIMANA	79.390.000	16.188	0,4282	0,04282	3719	0,4266	0,17064	3.589,82	0,222452	0,02225	892,42	0,18073	0,07229	0,30799	59.768.656	139.158.656
1	92.08.01.2002 MARSIS	4.670.000	380	0,0101	0,00101	292	0,0335	0,01340	46,39	0,00287	0,00029	37,47	0,00759	0,00304	0,01773	1.752.494	6.422.494
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	4.670.000	703	0,0186	0,00186	141	0,0162	0,00647	40,56	0,00251	0,00025	56,42	0,01143	0,00457	0,01315	3.438.514	8.108.514
3	92.08.01.2004 LOBO	4.670.000	960	0,0254	0,00254	253	0,0290	0,01161	334,75	0,02074	0,00207	53,58	0,01085	0,00434	0,02056	5.376.425	10.046.425
4	92.08.01.2005 TRIKORA	4.670.000	7.374	0,1950	0,01950	332	0,0381	0,01523	23,24	0,00144	0,00014	19,37	0,00392	0,00157	0,03645	8.105.634	12.775.634
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	4.670.000	512	0,0135	0,00135	206	0,0236	0,00945	200,14	0,01240	0,00124	37,35	0,00756	0,00303	0,01507	3.940.856	8.610.856
6	92.08.01.2007 SISIR	4.670.000	579	0,0153	0,00153	219	0,0251	0,01005	158,02	0,00979	0,00098	51,68	0,01047	0,00419	0,01675	3.242.254	7.912.254
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	4.670.000	381	0,0101	0,00101	284	0,0326	0,01303	130,09	0,00806	0,00081	51,50	0,01043	0,00417	0,01902	3.189.959	7.859.959
8	92.08.01.2009 MURANO	4.670.000	378	0,0100	0,00100	207	0,0237	0,00950	167,60	0,01039	0,00104	60,15	0,01218	0,00487	0,01641	3.216.106	7.886.106
9	92.08.01.2010 MAIMAI	4.670.000	645	0,0171	0,00171	118	0,0135	0,00541	203,73	0,01262	0,00126	58,93	0,01193	0,00477	0,01316	3.189.959	7.859.959
10	92.08.01.2011 LUMIRA	4.670.000	288	0,0076	0,00076	239	0,0274	0,01097	113,10	0,00701	0,00070	56,70	0,01148	0,00459	0,01702	3.268.401	7.938.401
11	92.08.01.2012 KAMAKA	4.670.000	348	0,0092	0,00092	267	0,0306	0,01225	198,63	0,01231	0,00123	56,91	0,01153	0,00461	0,01901	3.163.812	7.833.812
12	92.08.01.2013 COA	4.670.000	2.496	0,0660	0,00660	457	0,0524	0,02097	27,24	0,00169	0,00017	10,12	0,00205	0,00082	0,02856	5.523.186	10.193.186
13	92.08.01.2015 SARIA	4.670.000	180	0,0048	0,00048	79	0,0091	0,00362	149,68	0,00928	0,00093	55,49	0,01124	0,00450	0,00952	2.490.099	7.160.099
14	92.08.01.2016 JARATI	4.670.000	210	0,0056	0,00056	210	0,0241	0,00964	420,54	0,02606	0,00261	63,32	0,01282	0,00513	0,01793	3.242.254	7.912.254

15	92.08.01.2017	SARA	4.670.000	286	0,0076	0,00076	199	0,0228	0,00913	319,73	0,01981	0,00198	82,57	0,01672	0,00669	0,01856	1.726.102	6.396.102
16	92.08.01.2018	WERUA	4.670.000	231	0,0061	0,00061	93	0,0107	0,00427	604,31	0,03745	0,00374	58,14	0,01177	0,00471	0,01333	1.730.945	6.400.945
17	92.08.01.2019	ORAI	4.670.000	237	0,0063	0,00063	123	0,0141	0,00564	452,07	0,02801	0,00280	82,72	0,01675	0,00670	0,01577	3.171.656	7.841.656
B	92.08.02	BURUWAY	46.700.000	4.422	0,1170	0,01170	2299	0,2637	0,10548	3.785,96	0,23461	0,02346	570,32	0,11550	0,04620	0,18684	31.002.693	77.702.693
1	92.08.02.2001	KAMBALA	4.670.000	641	0,0170	0,00170	52	0,0060	0,00239	735,34	0,04557	0,00456	54,51	0,01104	0,00442	0,01305	3.413.191	8.083.191
2	92.08.02.2002	YARONA	4.670.000	433	0,0115	0,00115	101	0,0116	0,00463	411,05	0,02547	0,00255	59,26	0,01200	0,00480	0,01313	3.242.254	7.912.254
3	92.08.02.2003	EDOR	4.670.000	153	0,0040	0,00040	153	0,0175	0,00702	576,30	0,03571	0,00357	58,66	0,01188	0,00475	0,01575	4.117.580	8.787.580
4	92.08.02.2004	TAIRI	4.670.000	484	0,0128	0,00128	7	0,0008	0,00032	328,68	0,02037	0,00204	58,56	0,01186	0,00474	0,00838	2.191.629	6.861.629
5	92.08.02.2005	GAKA	4.670.000	344	0,0091	0,00091	344	0,0395	0,01578	201,36	0,01248	0,00125	57,87	0,01172	0,00469	0,02263	3.169.041	7.839.041
6	92.08.02.2006	GURIASA	4.670.000	389	0,0103	0,00103	346	0,0397	0,01588	424,85	0,02633	0,00263	56,82	0,01151	0,00460	0,02414	3.189.959	7.859.959
7	92.08.02.2007	ADIJAYA	4.670.000	882	0,0233	0,00233	392	0,0450	0,01799	116,44	0,00722	0,00072	51,15	0,01036	0,00414	0,0252	2.191.629	6.861.629
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	4.670.000	472	0,0125	0,00125	406	0,0466	0,01863	497,80	0,03085	0,00308	56,82	0,01151	0,00460	0,0276	3.166.427	7.836.427
9	92.08.02.2009	ESANIA	4.670.000	401	0,0106	0,00106	401	0,0460	0,01840	145,50	0,00902	0,00090	58,11	0,01177	0,00471	0,0251	3.197.803	7.867.803
10	92.08.02.2010	HIA	4.670.000	223	0,0059	0,00059	97	0,0111	0,00445	348,64	0,02160	0,00216	58,56	0,01186	0,00474	0,0119	3.123.178	7.793.178
C	92.08.03	TELUK ARGUNI	112.080.000	5.274	0,1395	0,01395	2383	0,2733	0,10934	2.809,39	0,17409	0,01741	1524,92	0,30882	0,12353	0,26422	66.327.236	178.407.236
1	92.08.03.2001	FURNUSU	4.670.000	120	0,0032	0,00032	28	0,0032	0,00128	17,82	0,00110	0,00011	72,81	0,01475	0,00590	0,0076	1.989.966	6.659.966
2	92.08.03.2002	FETERNU	4.670.000	270	0,0071	0,00071	148	0,0170	0,00679	6,33	0,00039	0,00004	59,34	0,01202	0,00481	0,0124	3.229.409	7.899.409
3	92.08.03.2003	SAWI	4.670.000	279	0,0074	0,00074	202	0,0232	0,00927	8,13	0,00050	0,00005	83,54	0,01692	0,00677	0,0168	4.052.817	8.722.817
4	92.08.03.2004	TUGARNI	4.670.000	350	0,0093	0,00093	150	0,0172	0,00688	9,77	0,00061	0,00006	54,34	0,01100	0,00440	0,0123	3.208.401	7.878.401
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	4.670.000	261	0,0069	0,00069	40	0,0046	0,00184	74,83	0,00464	0,00046	73,97	0,01498	0,00599	0,0090	2.348.388	7.018.388
6	92.08.03.2012	BOFUWER	4.670.000	218	0,0058	0,00058	37	0,0042	0,00170	13,37	0,00083	0,00008	61,45	0,01244	0,00498	0,0073	1.917.890	6.587.890
7	92.08.03.2013	WARWARS	4.670.000	211	0,0056	0,00056	17	0,0019	0,00078	36,71	0,00227	0,00023	47,12	0,00954	0,00382	0,0054	1.407.405	6.077.405
8	92.08.03.2014	WANGGITA	4.670.000	119	0,0031	0,00031	92	0,0106	0,00422	410,38	0,02543	0,00254	64,58	0,01308	0,00523	0,0123	3.218.811	7.888.811
9	92.08.03.2016	FUDIMA	4.670.000	181	0,0048	0,00048	62	0,0071	0,00284	400,99	0,02485	0,00248	62,48	0,01265	0,00506	0,0109	2.842.090	7.512.090

10	92.08.03.2017	WESWASA	4.670.000	289	0,0076	0,00076	42	0,0048	0,00193	30,57	0,00189	0,00019	71,20	0,01442	0,00577	0,0086	2.261.362	6.931.362
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	4.670.000	215	0,0057	0,00057	109	0,0125	0,00500	33,31	0,00206	0,00021	58,74	0,01190	0,00476	0,0105	2.754.499	7.424.499
12	92.08.03.2019	AFUAFU	4.670.000	229	0,0061	0,00061	97	0,0111	0,00445	25,57	0,00158	0,00016	57,34	0,01161	0,00464	0,0099	2.578.024	7.248.024
13	92.08.03.2020	BAYEDA	4.670.000	357	0,0094	0,00094	74	0,0085	0,00340	6,54	0,00041	0,00004	67,20	0,01361	0,00544	0,0098	2.568.633	7.238.633
14	92.08.03.2021	MOYANA	4.670.000	218	0,0058	0,00058	199	0,0228	0,00913	8,06	0,00050	0,00005	60,06	0,01216	0,00487	0,0146	3.823.340	8.493.340
15	92.08.03.2022	KOKORоба	4.670.000	339	0,0090	0,00090	234	0,0268	0,01074	6,51	0,00040	0,00004	75,12	0,01521	0,00609	0,0178	3.252.712	7.922.712
16	92.08.03.2023	WAINAGA	4.670.000	176	0,0047	0,00047	148	0,0170	0,00679	528,97	0,03278	0,00328	60,09	0,01217	0,00487	0,0154	3.247.483	7.917.483
17	92.08.03.2024	MASKUR	4.670.000	98	0,0026	0,00026	98	0,0112	0,00450	424,17	0,02628	0,00263	73,92	0,01497	0,00599	0,0134	3.252.712	7.922.712
18	92.08.03.2025	KENSI	4.670.000	263	0,0070	0,00070	236	0,0271	0,01083	50,94	0,00316	0,00032	54,63	0,01106	0,00443	0,0163	4.252.812	8.922.812
19	92.08.03.2027	ERIGARA	4.670.000	153	0,0040	0,00040	83	0,0095	0,00381	75,81	0,00470	0,00047	52,78	0,01069	0,00428	0,0090	2.342.323	7.012.323
20	92.08.03.2028	PIGO	4.670.000	220	0,0058	0,00058	8	0,0009	0,00037	249,47	0,01546	0,00155	54,63	0,01106	0,00443	0,0069	1.809.457	6.479.457
21	92.08.03.2029	TUGUMAWA	4.670.000	79	0,0021	0,00021	12	0,0014	0,00055	264,80	0,01641	0,00164	61,91	0,01254	0,00502	0,0074	1.938.963	6.608.963
22	92.08.03.2030	TIWARA	4.670.000	302	0,0080	0,00080	38	0,0044	0,00174	31,05	0,00192	0,00019	60,58	0,01227	0,00491	0,0076	1.998.201	6.668.201
23	92.08.03.2031	GUSI	4.670.000	214	0,0057	0,00057	116	0,0133	0,00532	88,89	0,00551	0,00055	61,45	0,01244	0,00498	0,0114	2.985.240	7.655.240
24	92.08.03.2032	WARUA	4.670.000	113	0,0030	0,00030	113	0,0130	0,00518	6,40	0,00040	0,00004	75,64	0,01532	0,00613	0,0117	3.046.298	7.716.298
D	92.08.04	TELUK ETNA	23.350.000	3.312	0,0876	0,00876	1921	0,2203	0,08814	1.412,03	0,08750	0,00875	298,47	0,06045	0,02418	0,12983	16.484.324	39.834.324
1	92.08.04.2001	RURUMO	4.670.000	520	0,0138	0,00138	121	0,0139	0,00555	180,63	0,01119	0,00112	56,24	0,01139	0,00456	0,0126	3.295.150	7.965.150
2	92.08.04.2002	BOIYA	4.670.000	569	0,0151	0,00151	453	0,0520	0,02078	323,12	0,02002	0,00200	58,59	0,01187	0,00475	0,0290	3.200.418	7.870.418
3	92.08.04.2003	NARIKI	4.670.000	417	0,0110	0,00110	417	0,0478	0,01913	351,12	0,02176	0,00218	66,02	0,01337	0,00535	0,0278	3.250.621	7.920.621
4	92.08.04.2004	BAMANA	4.670.000	399	0,0106	0,00106	350	0,0401	0,01606	314,73	0,01950	0,00195	61,85	0,01253	0,00501	0,0241	3.252.712	7.922.712
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	4.670.000	1.407	0,0372	0,00372	580	0,0665	0,02661	242,43	0,01502	0,00150	55,77	0,01129	0,00452	0,0364	3.485.423	8.155.423
E	92.08.05	KAMBRAU	32.690.000	2.535	0,0671	0,00671	2291	0,2628	0,10512	236,15	0,01463	0,00146	416,93	0,08444	0,03377	0,14706	22.016.717	54.706.717
1	92.08.05.2001	RAUNA	4.670.000	208	0,0055	0,00055	161	0,0185	0,00739	49,03	0,00304	0,00030	62,90	0,01274	0,00510	0,0133	3.487.079	8.157.079
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	4.670.000	302	0,0080	0,00080	302	0,0346	0,01386	53,66	0,00333	0,00033	59,90	0,01213	0,00485	0,0198	1.986.300	6.656.300

3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	4.670.000	511	0,0135	0,00135	426	0,0489	0,01955	40,83	0,00253	0,00025	56,63	0,01147	0,00459	0,0257	3.242.254	7.912.254
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	4.670.000	273	0,0072	0,00072	253	0,0290	0,01161	35,60	0,00221	0,00022	60,70	0,01229	0,00492	0,0175	2.980.782	7.650.782
5	92.08.05.2005	WAHO	4.670.000	521	0,0138	0,00138	521	0,0598	0,02390	48,81	0,00302	0,00030	57,87	0,01172	0,00469	0,0303	2.991.240	7.661.240
6	92.08.05.2006	WAMESA	4.670.000	240	0,0063	0,00063	148	0,0170	0,00679	3,56	0,00022	0,00002	60,40	0,01223	0,00489	0,0123	3.223.951	7.893.951
7	92.08.05.2007	KOORY	4.670.000	480	0,0127	0,00127	480	0,0551	0,02202	4,66	0,00029	0,00003	58,53	0,01185	0,00474	0,0281	4.105.111	8.775.111
F	92.08.06	ARGUNI BAWAH	70.050.000	3.554	0,0940	0,00940	2197	0,2520	0,10080	762,68	0,04726	0,00473	845,56	0,17124	0,06850	0,18343	44.637.361	114.687.361
1	92.08.06.2001	JAWERA	4.670.000	224	0,0059	0,00059	205	0,0235	0,00941	35,65	0,00221	0,00022	56,82	0,01151	0,00460	0,0148	3.245.391	7.915.391
2	92.08.06.2002	RUARA	4.670.000	283	0,0075	0,00075	88	0,0101	0,00404	43,37	0,00269	0,00027	47,39	0,00960	0,00384	0,0089	2.325.490	6.995.490
3	92.08.06.2003	WERMENU	4.670.000	235	0,0062	0,00062	108	0,0124	0,00496	35,53	0,00220	0,00022	48,08	0,00974	0,00389	0,00969	2.534.142	7.204.142
4	92.08.06.2004	EGERWARA	4.670.000	143	0,0038	0,00038	44	0,0050	0,00202	41,80	0,00259	0,00026	65,93	0,01335	0,00534	0,0080	2.090.952	6.760.952
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	4.670.000	124	0,0033	0,00033	86	0,0099	0,00395	58,41	0,00362	0,00036	68,67	0,01391	0,00556	0,0102	2.666.629	7.336.629
6	92.08.06.2006	MANGGERA	4.670.000	294	0,0078	0,00078	294	0,0337	0,01349	58,13	0,00360	0,00036	48,58	0,00984	0,00394	0,0186	3.245.391	7.915.391
7	92.08.06.2007	TANUSAN	4.670.000	264	0,0070	0,00070	170	0,0195	0,00780	65,53	0,00406	0,00041	44,53	0,00902	0,00361	0,0125	3.242.254	7.912.254
8	92.08.06.2008	URISA	4.670.000	292	0,0077	0,00077	230	0,0264	0,01055	38,91	0,00241	0,00024	60,42	0,01224	0,00489	0,0165	4.304.033	8.974.033
9	92.08.06.2009	WAROMI	4.670.000	126	0,0033	0,00033	99	0,0114	0,00454	71,83	0,00445	0,00045	63,10	0,01278	0,00511	0,0104	2.727.738	7.397.738
10	92.08.06.2010	UKIARA	4.670.000	309	0,0082	0,00082	213	0,0244	0,00977	37,39	0,00232	0,00023	62,81	0,01272	0,00509	0,0159	3.248.006	7.918.006
11	92.08.06.2012	NAGURA	4.670.000	440	0,0116	0,00116	93	0,0107	0,00427	46,93	0,00291	0,00029	47,77	0,00967	0,00387	0,0096	2.507.875	7.177.875
12	92.08.06.2013	INARI	4.670.000	122	0,0032	0,00032	122	0,0140	0,00560	84,93	0,00526	0,00053	61,18	0,01239	0,00496	0,0114	2.981.458	7.651.458
13	92.08.06.2014	WANOMA	4.670.000	191	0,0051	0,00051	121	0,0139	0,00555	94,54	0,00586	0,00059	59,06	0,01196	0,00478	0,0114	2.987.850	7.657.850
14	92.08.06.2015	SUMUN	4.670.000	329	0,0087	0,00087	146	0,0167	0,00670	29,57	0,00183	0,00018	56,25	0,01139	0,00456	0,0123	3.218.427	7.888.427
15	92.08.06.2016	SERARAN	4.670.000	178	0,0047	0,00047	178	0,0204	0,00817	20,16	0,00125	0,00012	54,97	0,01113	0,00445	0,0132	3.311.725	7.981.725
G	92.08.07	YAMOR	28.020.000	1843	0,0487	0,00487	1262	0,1448	0,05790	3.541,47	0,21946	0,02195	464,53	0,09407	0,037630	0,1224	21.163.177	49.183.177
1	92.08.07.2001	URE	4.670.000	126	0,0033	0,00033	105	0,0120	0,00482	1.150,66	0,07130	0,00713	58,72	0,01189	0,00476	0,0170	3.372.990	8.042.990
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	4.670.000	40	0,0011	0,00011	40	0,0046	0,00184	426,56	0,02643	0,00264	89,91	0,01821	0,00728	0,0119	3.974.003	8.644.003

3	92.08.07.2003	URUBIKA	4.670.000	708	0,0187	0,00187	174	0,0200	0,00798	608,67	0,03772	0,00377	64,53	0,01307	0,00523	0,0189	3.529.873	8.199.873
4	92.08.07.2004	WAGOHA	4.670.000	376	0,0099	0,00099	394	0,0452	0,01808	557,34	0,03454	0,00345	88,43	0,01791	0,00716	0,0297	3.320.695	7.990.695
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	4.670.000	375	0,0099	0,00099	375	0,0430	0,01721	480,84	0,02980	0,00298	68,75	0,01392	0,00557	0,0267	3.582.167	8.252.167
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	4.670.000	218	0,0058	0,00058	174	0,0200	0,00798	317,40	0,01967	0,00197	94,19	0,01908	0,00763	0,0182	3.383.449	8.053.449
TOTAL			392.280.000	37.128	0,98	0,10	16.072	1,84	0,74	16.137,50	1,00	0,10	5.013,15	1,0	0,41	1,3	261.400.164	653.680.164,00

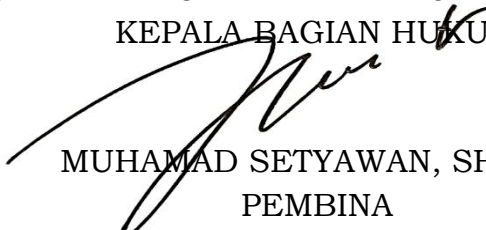
KONTROL PENGHITUNGAN		
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (BHPD)	Rp	653.680.164 (a)
Pagu Alokasi Dasar	60% Rp	392.280.000 (b)
Pagu Alokasi Formula	40% Rp	261.400.164 (c)

(d)
(e)

BOBOT		
Jumlah Penduduk	37.806	10% (f)
Jumlah Penduduk Miskin	16.072	40% (g)
Luas Wilayah	16.137,50	10% (h)
Indeks Kesulitan Geografis	5.013,15	40% (i)
Jumlah Distrik	7	
Jumlah Kampung Definitf	84	

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA												PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG		
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				JUMLAH ALOKASI FORMULA	
			Jumlah Penduduk <i>(JP)</i>	Rasio Jumlah Penduduk <i>(RJP)</i>	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin <i>(JPM)</i>	Rasio Penduduk Miskin <i>(RPM)</i>	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah <i>(LW)</i>	Rasio Luas Wilayah <i>(RLW)</i>	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis <i>(IKG)</i>	Rasio Indeks Kesulitan Geografis <i>(RIKG)</i>	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			TOTAL BOBOT VARIABEL
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
A	92.08.01 KAIMANA	79.067.000	16188	0,4282	0,04282	3719	0,4266	0,17064	3.589,82	0,222452	0,02225	892,42	0,18073	0,07229	0,30809	65.009.000	144.076.000
1	92.08.01.2002 MARSIS	4.651.000	380	0,0101	0,00101	292	0,0335	0,01340	46,39	0,00287	0,00029	37,47	0,00759	0,00304	0,01773	1.745.480	6.396.480
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	4.651.000	703	0,0186	0,00186	141	0,0162	0,00647	40,56	0,00251	0,00025	56,42	0,01143	0,00457	0,01315	3.333.440	7.984.440
3	92.08.01.2004 LOBO	4.651.000	960	0,0254	0,00254	253	0,0290	0,01161	334,75	0,02074	0,00207	53,58	0,01085	0,00434	0,02066	5.381.160	10.032.160
4	92.08.01.2005 TRIKORA	4.651.000	7.374	0,1950	0,01950	332	0,0381	0,01523	23,24	0,00144	0,00014	19,37	0,00392	0,00157	0,03645	8.854.430	13.505.430
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	4.651.000	512	0,0135	0,00135	206	0,0236	0,00945	200,14	0,01240	0,00124	37,35	0,00756	0,00303	0,01507	3.925.070	8.576.070
6	92.08.01.2007 SISIR	4.651.000	579	0,0153	0,00153	219	0,0251	0,01005	158,02	0,00979	0,00098	51,68	0,01047	0,00419	0,01675	3.125.100	7.776.100
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	4.651.000	381	0,0101	0,00101	284	0,0326	0,01303	130,09	0,00806	0,00081	51,50	0,01043	0,00417	0,01902	2.864.670	7.515.670
8	92.08.01.2009 MURANO	4.651.000	378	0,0100	0,00100	207	0,0237	0,00950	167,60	0,01039	0,00104	60,15	0,01218	0,00487	0,01641	3.125.090	7.776.090
9	92.08.01.2010 MAIMAI	4.651.000	645	0,0171	0,00171	118	0,0135	0,00541	203,73	0,01262	0,00126	58,93	0,01193	0,00477	0,01316	3.426.240	8.077.240
10	92.08.01.2011 LUMIRA	4.651.000	288	0,0076	0,00076	239	0,0274	0,01097	113,10	0,00701	0,00070	56,70	0,01148	0,00459	0,01702	3.229.260	7.880.260
11	92.08.01.2012 KAMAKA	4.651.000	348	0,0092	0,00092	267	0,0306	0,01225	198,63	0,01231	0,00123	56,91	0,01153	0,00461	0,01901	3.229.260	7.880.260
12	92.08.01.2013 COA	4.651.000	2.496	0,0660	0,00660	457	0,0524	0,02097	27,24	0,00169	0,00017	10,12	0,00205	0,00082	0,02856	7.343.980	11.994.980
13	92.08.01.2015 SARIA	4.651.000	180	0,0048	0,00048	79	0,0091	0,00362	149,68	0,00928	0,00093	55,49	0,01124	0,00450	0,00952	2.480.130	7.131.130
14	92.08.01.2016 JARATI	4.651.000	210	0,0056	0,00056	210	0,0241	0,00964	420,54	0,02606	0,00261	63,32	0,01282	0,00513	0,01793	3.333.430	7.984.430

15	92.08.01.2017	SARA	4.651.000	286	0,0076	0,00076	199	0,0228	0,00913	319,73	0,01981	0,00198	82,57	0,01672	0,00669	0,01856	3.362.080	8.013.080
16	92.08.01.2018	WERUA	4.651.000	231	0,0061	0,00061	93	0,0107	0,00427	604,31	0,03745	0,00374	58,14	0,01177	0,00471	0,01333	3.125.090	7.776.090
17	92.08.01.2019	ORAI	4.651.000	237	0,0063	0,00063	123	0,0141	0,00564	452,07	0,02801	0,00280	82,72	0,01675	0,00670	0,01577	3.125.090	7.776.090
B	92.08.02	BURUWAY	46.510.000	4.422	0,1170	0,01170	2299	0,2637	0,10548	3.785,96	0,23461	0,02346	570,32	0,11550	0,04620	0,18684	31.407.260	77.917.260
1	92.08.02.2001	KAMBALA	4.651.000	641	0,0170	0,00170	52	0,0060	0,00239	735,34	0,04557	0,00456	54,51	0,01104	0,00442	0,01305	3.399.510	8.050.510
2	92.08.02.2002	YARONA	4.651.000	433	0,0115	0,00115	101	0,0116	0,00463	411,05	0,02547	0,00255	59,26	0,01200	0,00480	0,01313	2.864.680	7.515.680
3	92.08.02.2003	EDOR	4.651.000	153	0,0040	0,00040	153	0,0175	0,00702	576,30	0,03571	0,00357	58,66	0,01188	0,00475	0,01575	3.125.090	7.776.090
4	92.08.02.2004	TAIRI	4.651.000	484	0,0128	0,00128	7	0,0008	0,00032	328,68	0,02037	0,00204	58,56	0,01186	0,00474	0,00838	2.182.850	6.833.850
5	92.08.02.2005	GAKA	4.651.000	344	0,0091	0,00091	344	0,0395	0,01578	201,36	0,01248	0,00125	57,87	0,01172	0,00469	0,02263	3.333.440	7.984.440
6	92.08.02.2006	GURIASA	4.651.000	389	0,0103	0,00103	346	0,0397	0,01588	424,85	0,02633	0,00263	56,82	0,01151	0,00460	0,02414	3.362.090	8.013.090
7	92.08.02.2007	ADIJAYA	4.651.000	882	0,0233	0,00233	392	0,0450	0,01799	116,44	0,00722	0,00072	51,15	0,01036	0,00414	0,0252	3.333.430	7.984.430
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	4.651.000	472	0,0125	0,00125	406	0,0466	0,01863	497,80	0,03085	0,00308	56,82	0,01151	0,00460	0,0276	3.333.430	7.984.430
9	92.08.02.2009	ESANIA	4.651.000	401	0,0106	0,00106	401	0,0460	0,01840	145,50	0,00902	0,00090	58,11	0,01177	0,00471	0,0251	3.362.080	8.013.080
10	92.08.02.2010	HIA	4.651.000	223	0,0059	0,00059	97	0,0111	0,00445	348,64	0,02160	0,00216	58,56	0,01186	0,00474	0,0119	3.110.660	7.761.660
C	92.08.03	TELUK ARGUNI	111.624.000	5.274	0,1395	0,01395	2383	0,2733	0,10934	2.809,39	0,17409	0,01741	1524,92	0,30882	0,12353	0,26422	64.855.010	176.479.010
1	92.08.03.2001	FURNUSU	4.651.000	120	0,0032	0,00032	28	0,0032	0,00128	17,82	0,00110	0,00011	72,81	0,01475	0,00590	0,0076	1.981.990	6.632.990
2	92.08.03.2002	FETERNU	4.651.000	270	0,0071	0,00071	148	0,0170	0,00679	6,33	0,00039	0,00004	59,34	0,01202	0,00481	0,0124	3.216.480	7.867.480
3	92.08.03.2003	SAWI	4.651.000	279	0,0074	0,00074	202	0,0232	0,00927	8,13	0,00050	0,00005	83,54	0,01692	0,00677	0,0168	3.367.280	8.018.280
4	92.08.03.2004	TUGARNI	4.651.000	350	0,0093	0,00093	150	0,0172	0,00688	9,77	0,00061	0,00006	54,34	0,01100	0,00440	0,0123	3.195.550	7.846.550
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	4.651.000	261	0,0069	0,00069	40	0,0046	0,00184	74,83	0,00464	0,00046	73,97	0,01498	0,00599	0,0090	2.338.980	6.989.980
6	92.08.03.2012	BOFUWER	4.651.000	218	0,0058	0,00058	37	0,0042	0,00170	13,37	0,00083	0,00008	61,45	0,01244	0,00498	0,0073	1.910.210	6.561.210
7	92.08.03.2013	WARWARS	4.651.000	211	0,0056	0,00056	17	0,0019	0,00078	36,71	0,00227	0,00023	47,12	0,00954	0,00382	0,0054	1.401.770	6.052.770
8	92.08.03.2014	WANGGITA	4.651.000	119	0,0031	0,00031	92	0,0106	0,00422	410,38	0,02543	0,00254	64,58	0,01308	0,00523	0,0123	3.205.910	7.856.910
9	92.08.03.2016	FUDIMA	4.651.000	181	0,0048	0,00048	62	0,0071	0,00284	400,99	0,02485	0,00248	62,48	0,01265	0,00506	0,0109	2.830.700	7.481.700

10	92.08.03.2017	WESWASA	4.651.000	289	0,0076	0,00076	42	0,0048	0,00193	30,57	0,00189	0,00019	71,20	0,01442	0,00577	0,0086	2.252.300	6.903.300
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	4.651.000	215	0,0057	0,00057	109	0,0125	0,00500	33,31	0,00206	0,00021	58,74	0,01190	0,00476	0,0105	2.743.460	7.394.460
12	92.08.03.2019	AFUAFU	4.651.000	229	0,0061	0,00061	97	0,0111	0,00445	25,57	0,00158	0,00016	57,34	0,01161	0,00464	0,0099	2.567.690	7.218.690
13	92.08.03.2020	BAYEDA	4.651.000	357	0,0094	0,00094	74	0,0085	0,00340	6,54	0,00041	0,00004	67,20	0,01361	0,00544	0,0098	2.558.350	7.209.350
14	92.08.03.2021	MOYANA	4.651.000	218	0,0058	0,00058	199	0,0228	0,00913	8,06	0,00050	0,00005	60,06	0,01216	0,00487	0,0146	3.808.020	8.459.020
15	92.08.03.2022	KOKORоба	4.651.000	339	0,0090	0,00090	234	0,0268	0,01074	6,51	0,00040	0,00004	75,12	0,01521	0,00609	0,0178	3.362.090	8.013.090
16	92.08.03.2023	WAINAGA	4.651.000	176	0,0047	0,00047	148	0,0170	0,00679	528,97	0,03278	0,00328	60,09	0,01217	0,00487	0,0154	3.338.640	7.989.640
17	92.08.03.2024	MASKUR	4.651.000	98	0,0026	0,00026	98	0,0112	0,00450	424,17	0,02628	0,00263	73,92	0,01497	0,00599	0,0134	3.482.440	8.133.440
18	92.08.03.2025	KENSI	4.651.000	263	0,0070	0,00070	236	0,0271	0,01083	50,94	0,00316	0,00032	54,63	0,01106	0,00443	0,0163	3.229.260	7.880.260
19	92.08.03.2027	ERIGARA	4.651.000	153	0,0040	0,00040	83	0,0095	0,00381	75,81	0,00470	0,00047	52,78	0,01069	0,00428	0,0090	2.332.930	6.983.930
20	92.08.03.2028	PIGO	4.651.000	220	0,0058	0,00058	8	0,0009	0,00037	249,47	0,01546	0,00155	54,63	0,01106	0,00443	0,0069	1.802.200	6.453.200
21	92.08.03.2029	TUGUMAWA	4.651.000	79	0,0021	0,00021	12	0,0014	0,00055	264,80	0,01641	0,00164	61,91	0,01254	0,00502	0,0074	1.931.190	6.582.190
22	92.08.03.2030	TIWARA	4.651.000	302	0,0080	0,00080	38	0,0044	0,00174	31,05	0,00192	0,00019	60,58	0,01227	0,00491	0,0076	1.990.190	6.641.190
23	92.08.03.2031	GUSI	4.651.000	214	0,0057	0,00057	116	0,0133	0,00532	88,89	0,00551	0,00055	61,45	0,01244	0,00498	0,0114	2.973.290	7.624.290
24	92.08.03.2032	WARUA	4.651.000	113	0,0030	0,00030	113	0,0130	0,00518	6,40	0,00040	0,00004	75,64	0,01532	0,00613	0,0117	3.034.090	7.685.090
D	92.08.04	TELUK ETNA	23.255.000	3.312	0,0876	0,00876	1921	0,2203	0,08814	1.412,03	0,08750	0,00875	298,47	0,06045	0,02418	0,12832	16.161.640	39.416.640
1	92.08.04.2001	RURUMO	4.651.000	520	0,0138	0,00138	121	0,0139	0,00555	180,63	0,01119	0,00112	56,24	0,01139	0,00456	0,0111	2.890.420	7.541.420
2	92.08.04.2002	BOIYA	4.651.000	569	0,0151	0,00151	453	0,0520	0,02078	323,12	0,02002	0,00200	58,59	0,01187	0,00475	0,0290	3.333.430	7.984.430
3	92.08.04.2003	NARIKI	4.651.000	417	0,0110	0,00110	417	0,0478	0,01913	351,12	0,02176	0,00218	66,02	0,01337	0,00535	0,0278	3.354.260	8.005.260
4	92.08.04.2004	BAMANA	4.651.000	399	0,0106	0,00106	350	0,0401	0,01606	314,73	0,01950	0,00195	61,85	0,01253	0,00501	0,0241	3.229.270	7.880.270
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	4.651.000	1.407	0,0372	0,00372	580	0,0665	0,02661	242,43	0,01502	0,00150	55,77	0,01129	0,00452	0,0364	3.354.260	8.005.260
E	92.08.05	KAMBRAU	32.557.000	2.535	0,0671	0,00671	2291	0,2628	0,10512	236,15	0,01463	0,00146	416,93	0,08444	0,03377	0,14706	22.111.710	54.668.710
1	92.08.05.2001	RAUNA	4.651.000	208	0,0055	0,00055	161	0,0185	0,00739	49,03	0,00304	0,00030	62,90	0,01274	0,00510	0,0133	3.473.110	8.124.110
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	4.651.000	302	0,0080	0,00080	302	0,0346	0,01386	53,66	0,00333	0,00033	59,90	0,01213	0,00485	0,0198	3.229.260	7.880.260

3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	4.651.000	511	0,0135	0,00135	426	0,0489	0,01955	40,83	0,00253	0,00025	56,63	0,01147	0,00459	0,0257	3.229.270	7.880.270
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	4.651.000	273	0,0072	0,00072	253	0,0290	0,01161	35,60	0,00221	0,00022	60,70	0,01229	0,00492	0,0175	3.354.270	8.005.270
5	92.08.05.2005	WAHO	4.651.000	521	0,0138	0,00138	521	0,0598	0,02390	48,81	0,00302	0,00030	57,87	0,01172	0,00469	0,0303	3.343.860	7.994.860
6	92.08.05.2006	WAMESA	4.651.000	240	0,0063	0,00063	148	0,0170	0,00679	3,56	0,00022	0,00002	60,40	0,01223	0,00489	0,0123	2.135.480	6.786.480
7	92.08.05.2007	KOORY	4.651.000	480	0,0127	0,00127	480	0,0551	0,02202	4,66	0,00029	0,00003	58,53	0,01185	0,00474	0,0281	3.346.460	7.997.460
F	92.08.06	ARGUNI BAWAH	69.765.000	3.554	0,0940	0,00940	2197	0,2520	0,10080	762,68	0,04726	0,00473	845,56	0,17124	0,06850	0,18343	39.385.668	109.150.668
1	92.08.06.2001	JAWERA	4.651.000	224	0,0059	0,00059	205	0,0235	0,00941	35,65	0,00221	0,00022	56,82	0,01151	0,00460	0,0148	3.860.020	8.511.020
2	92.08.06.2002	RUARA	4.651.000	283	0,0075	0,00075	88	0,0101	0,00404	43,37	0,00269	0,00027	47,39	0,00960	0,00384	0,0089	2.316.170	6.967.170
3	92.08.06.2003	WERMENU	4.651.000	235	0,0062	0,00062	108	0,0124	0,00496	35,53	0,00220	0,00022	48,08	0,00974	0,00389	0,00969	2.901.578	7.552.578
4	92.08.06.2004	EGERWARA	4.651.000	143	0,0038	0,00038	44	0,0050	0,00202	41,80	0,00259	0,00026	65,93	0,01335	0,00534	0,0080	2.082.580	6.733.580
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	4.651.000	124	0,0033	0,00033	86	0,0099	0,00395	58,41	0,00362	0,00036	68,67	0,01391	0,00556	0,0102	2.655.950	7.306.950
6	92.08.06.2006	MANGGERA	4.651.000	294	0,0078	0,00078	294	0,0337	0,01349	58,13	0,00360	0,00036	48,58	0,00984	0,00394	0,0186	3.032.380	7.683.380
7	92.08.06.2007	TANUSAN	4.651.000	264	0,0070	0,00070	170	0,0195	0,00780	65,53	0,00406	0,00041	44,53	0,00902	0,00361	0,0125	3.258.320	7.909.320
8	92.08.06.2008	URISA	4.651.000	292	0,0077	0,00077	230	0,0264	0,01055	38,91	0,00241	0,00024	60,42	0,01224	0,00489	0,0165	1.635.530	6.286.530
9	92.08.06.2009	WAROMI	4.651.000	126	0,0033	0,00033	99	0,0114	0,00454	71,83	0,00445	0,00045	63,10	0,01278	0,00511	0,0104	2.716.820	7.367.820
10	92.08.06.2010	UKIARA	4.651.000	309	0,0082	0,00082	213	0,0244	0,00977	37,39	0,00232	0,00023	62,81	0,01272	0,00509	0,0159	2.082.350	6.733.350
11	92.08.06.2012	NAGURA	4.651.000	440	0,0116	0,00116	93	0,0107	0,00427	46,93	0,00291	0,00029	47,77	0,00967	0,00387	0,0096	2.497.820	7.148.820
12	92.08.06.2013	INARI	4.651.000	122	0,0032	0,00032	122	0,0140	0,00560	84,93	0,00526	0,00053	61,18	0,01239	0,00496	0,0114	2.082.360	6.733.360
13	92.08.06.2014	WANOMA	4.651.000	191	0,0051	0,00051	121	0,0139	0,00555	94,54	0,00586	0,00059	59,06	0,01196	0,00478	0,0114	2.975.890	7.626.890
14	92.08.06.2015	SUMUN	4.651.000	329	0,0087	0,00087	146	0,0167	0,00670	29,57	0,00183	0,00018	56,25	0,01139	0,00456	0,0123	3.205.540	7.856.540
15	92.08.06.2016	SERARAN	4.651.000	178	0,0047	0,00047	178	0,0204	0,00817	20,16	0,00125	0,00012	54,97	0,01113	0,00445	0,0132	2.082.360	6.733.360
G	92.08.07	YAMOR	27.906.000	1843	0,0487	0,00487	1262	0,1448	0,05790	3.541,47	0,21946	0,02195	464,53	0,09407	0,037630	0,1224	21.494.290	49.400.290
1	92.08.07.2001	URE	4.651.000	126	0,0033	0,00033	105	0,0120	0,00482	1.150,66	0,07130	0,00713	58,72	0,01189	0,00476	0,0170	4.437.100	9.088.100
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	4.651.000	40	0,0011	0,00011	40	0,0046	0,00184	426,56	0,02643	0,00264	89,91	0,01821	0,00728	0,0119	3.090.630	7.741.630

3	92.08.07.2003	URUBIKA	4.651.000	708	0,0187	0,00187	174	0,0200	0,00798	608,67	0,03772	0,00377	64,53	0,01307	0,00523	0,0189	3.640.740	8.291.740
4	92.08.07.2004	WAGOHA	4.651.000	376	0,0099	0,00099	394	0,0452	0,01808	557,34	0,03454	0,00345	88,43	0,01791	0,00716	0,0297	3.617.300	8.268.300
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	4.651.000	375	0,0099	0,00099	375	0,0430	0,01721	480,84	0,02980	0,00298	68,75	0,01392	0,00557	0,0267	3.354.260	8.005.260
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	4.651.000	218	0,0058	0,00058	174	0,0200	0,00798	317,40	0,01967	0,00197	94,19	0,01908	0,00763	0,0182	3.354.260	8.005.260
TOTAL			390.684.000	37.128	0,98	0,10	16.072	1,84	0,74	16.137,50	1,00	0,10	5.013,15	1,0	0,41	1,3	260.424.578	651.108.578

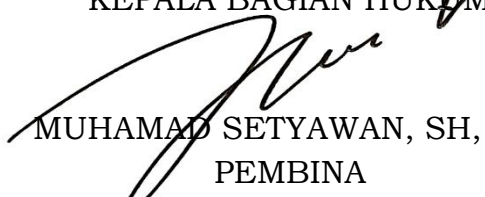
KONTROL PENGHITUNGAN			
BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD)	Rp	651.108.578	(a)
Pagu Alokasi Dasar	60% Rp	390.684.000	(b)
Pagu Alokasi Formula	40% Rp	260.424.578	(c)

(d)
(e)

BOBOT			
Jumlah Penduduk	37.806	10%	(f)
Jumlah Penduduk Miskin	16.072	40%	(g)
Luas Wilayah	16.137,50	10%	(h)
Indeks Kesulitan Geografis	4.937,87	40%	(i)
Jumlah Distrik	7		
Jumlah Kampung Definitif	84		

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					RP.	RP.	RP.		Orang	Hari	RP.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. 5.	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>											
2. 5. 1	Kegiatan											
	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3. 1.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>											
3. 1. 2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

Disetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung,
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
 KEPALA DISTRIK

(.....)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>								
2.4.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.5	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>								
2.5.1	Kegiatan								
	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja)								

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK

(.....)

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KAMPUNG

DISTRIK

KABUPATEN KAIMANA

Kampung,

Kepada

Yth : BUPATI KAIMANA

Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyahuran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 (satu) Berkas	
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupate Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

KEPALA KAMPUNG
.....

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN KAIMANA

Telah terima dari : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA
Untuk Keperluan : PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN BAGIAN HASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN :
Dengan rincian :

JENIS	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH		RP.	
BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH		RP.	
JUMLAH		RP.	

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank : BANK

Kampung,

KEPALA KAMPUNG
.....

MATERAI
RP. 10.000,-

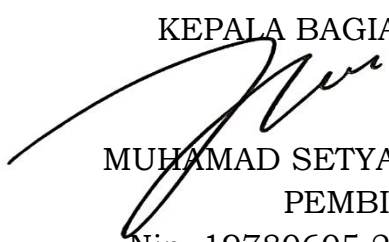
(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001